

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Nomor SOP	OT.01.02-003-053.De.4			
Tanggal Pembuatan	Selasa, 07 November 2017			
Tanggal Revisi			Revisi ke	
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018	<b>✓</b>		

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P NRP. 8339/P

**Judul SOP Mikro** 

Disahkan oleh

Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L di bidang Pertahanan Negara

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang     Pertahanan Negara				
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan				
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam	<ul><li>3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik</li><li>4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik</li></ul>				
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019	5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik				
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam					
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan:				
1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di bidang	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi				
Pertahanan Negara	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)				
	3. Kendaraan roda dua dan empat				
	4. Telepon, Faksimile, dsb				
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :				
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L	Disimpan dalam data elektronik dan manual				

## SOP Mikro Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan K/L di bidang Pertahanan Negara

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	. Kegiatan	Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag TU	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melaksanakan koordinasi dengan Asdep terkait sehubungan dengan pelaksanaan rakor kebijakan K/L dan menugaskan Kabag Tata Usaha dan Umum untuk menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi					Program kerja + arahan Deputi	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melaksanakan koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Pertahanan Negara dan menugaskan Kasubbag dan Pelaksana untuk menyiapkan dokumen administrasi rapat					Disposisi/arahan Asdep	60 menit	Koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor + disposisi	
3	Menyiapkan dokumen administrasi rapat dan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang ada, kemudian melaporkannya kepada Kabag				<b>→</b>	Koordinasi teknis terkait pelaksanaan rakor + disposisi	60 menit	Dokumen administrasi rapat	
4	Menyampaikan hasil koordinasi + kesiapan pelaksanaan rakor kepada Sesdep					Dokumen administrasi rapat	30 Menit	hasil koordinasi + dokumen administrasi rapat	
5.	Melaporkan kesiapan pelaksanaan rakor + memantau pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Pertahanan Negara kepada Deputi					hasil koordinasi + dokumen administrasi rapat	15 Menit	Pelaporan kesiapan pelaksanaan rakor kebijakan K/L di bidang Pertahanan Negara	